

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS ANGGARAN BERBASIS GENDER: KOMITMEN PIMPINAN, KEBIJAKAN PERATURAN DAN ANALISIS GENDER

Tri Apriadi<sup>1</sup>, Cris Kuntadi<sup>2</sup>, R. Luki Karunia<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 1) Mahasiswa Magister Konsentrasi Manajemen Keuangan Negara, STIALAN Jakarta email: [tri.2443021009@stialan.ac.id](mailto:tri.2443021009@stialan.ac.id)

<sup>2</sup> Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: [cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>3</sup> Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta, Email: [luki@stialan.ac.id](mailto:luki@stialan.ac.id)

*Corresponding author: Tri Apriadi<sup>1</sup>*

| Recieved: 15-10-2024

| Revised: 16-10-2024

|| Accepted: 17-10-2024

### **Abstract:**

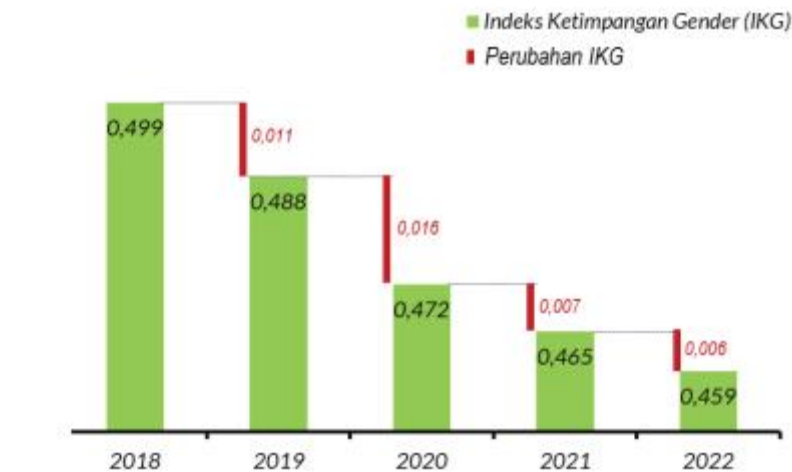
Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses, keuntungan, kontrol, dan manfaat dalam menikmati hasil Pembangunan. Anggaran untuk ARG terdiri dari tiga kategori: anggaran kesetaraan gender (atau *mainstream/integrated* untuk mengatasi masalah kesenjangan gender), anggaran khusus untuk target gender (atau untuk pemenuhan khusus jenis kelamin/satu kelompok tertinggal/afirmasi), dan anggaran untuk pelembagaan pengarusutamaan gender untuk menginternaisasi PUG sebagai bisnis proses di internal Kementerian/Lembaga. Anggaran khusus target gender dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar perempuan dan laki-laki berdasarkan hasil analisis gender. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender dialokasikan untuk memperkuat lembaga PUG dengan meningkatkan pendataan dan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pendekatan literatur review, penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi kualitas anggaran berbasis gender, yaitu komitmen pimpinan, kebijakan peraturan dan analisis gender terhadap kualitas anggaran berbasis gender. Hasil penelitian ini adalah: 1) komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender; 2) kebijakan peraturan berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender; dan 3) analisis gender berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender.

**Keywords:** Kualitas anggaran berbasis gender, komitmen pimpinan, kebijakan peraturan dan analisis gender



## Introduction

Mulai tahun 2017, Badan Pusat Statistik mulai melakukan kajian mengenai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai pengembangan *Gender Inequality Index* (GII) yang diusung *United Nations Development Programme* (UNDP). Keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti dengan kesetaraan gender, sehingga antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mempunyai korelasi negatif dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).



Sumber: BPS, 2023

Gambar 1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 2018–2022

Indeks Ketimpangan Gender adalah sebuah indeks komposit yang dibangun dari lima indikator yang menggambarkan tingkat kesetaraan gender di suatu wilayah. Untuk mengkaji apa yang menjadi determinan utama perubahan nilai IKG Indonesia, maka pembahasan akan kembali kepada tren atau perkembangan indikator atau dimensi pembentuk IKG, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Untuk mengatasi kesenjangan gender tersebut dirumuskanlah strategi pengarusutamaan gender (PUG). Dalam tataran kebijakan nasional, regulasi terkait pengarusutamaan gender dimulai sejak tahun 1974 dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Kebijakan lain yang memayungi pengarusutamaan gender diantaranya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan juga Surat Edaran Bersama Empat Menteri Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Anggaran Responsif Gender (ARG) ditandatangani untuk melaksanakan penganggaran responsif gender. ARG adalah anggaran yang memberikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam hal akses, manfaat, kontrol, pengambilan keputusan, dan kesempatan, serta peluang untuk

menikmati hasil pembangunan (KPPPA, 2010). Sharp and Broomhill dalam Budlender et al (2002) menyebutkan *Gender Responsive Budget* mencakup *Gender specific expenditures*, *Expenditures that promote gender equity within the public service*, dan *General or mainstream expenditure*. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses, keuntungan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber daya. ARG juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan (Kemenkeu, 2022).

Banyak penelitian sebelumnya yang telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kualitas anggaran berbasis gender. Namun, belum ada yang melakukan penulisan *Literature Review* untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar variabel eksogen ( $X_1$ ) Komitmen pimpinan, ( $X_2$ ) Kebijakan peraturan, ( $X_3$ ) Analisis gender ( $Y$ ) Anggaran responsif gender. Artikel ini memberikan ringkasan dan analisis sistematis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan telah dipublikasikan, tentang faktor komitmen pimpinan dan kebinjakan peraturan, dan Analisis Gender yang mempengaruhi *Anggaran berbasis gender*.

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender?
2. Apakah kebijakan peraturan berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender?
3. Apakah analisis gender berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender

## Literature Review

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada, untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Meskipun konsep ini telah diadopsi di berbagai negara, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Peneliti memeriksa sejumlah penelitian tentang ARG karena dampak ini pada suatu negara. Mereka menemukan bahwa penelitian di Nairobi (Afrika) menunjukkan bahwa pengetahuan stakeholder tentang konsep gender adalah salah satu hambatan untuk menerapkan ARG. (Biduri et. al 2020) ARG menekankan bahwa pengelolaan keuangan publik (pemerintah) dan kesetaraan gender adalah dua masalah penting yang saling terkait. ARG menegaskan bahwa prinsip kesetaraan gender harus diterapkan di setiap langkah penganggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas anggaran berbasis gender, dengan fokus pada tiga faktor utama: komitmen pimpinan, kebijakan dan peraturan, serta analisis gender.

Melaksanakan upaya pembangunan bangsa adalah hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional pada tahun 2000. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender tidak memerlukan penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang berbeda dari laki-laki; ini sejalan dengan sistem yang sudah ada. Peraturan yang berkaitan dengan penyetaraan gender dibuat setelah undang-undang tersebut dibuat. Pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang PUG pada Pembangunan Nasional untuk menekankan pentingnya kesetaraan gender. Para ilmuwan sosial menggunakan gender untuk mengungkapkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dibawa oleh Tuhan dan bagaimana budaya dibangun, dipelajari, dan disosialisasikan. Anggaran yang bias gender hanya melibatkan satu gender, tanpa memperhitungkan gender lain, terutama perempuan. (Biduri, et al, 2022 ).

Anggaran responsive gender ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Sabhana, Pertiwi, 2020), (Khaerah, Mutiarin, 2016), (Biduri, et al 2022), (Mandasari, 2022), (Widianto, 2015), (Samodra, Rahayu, 2021), (Syafri, 2012), (Anatasari, 2016), (Batubara, et all, 2020), (Sholeh,

2023), (Maimanah, Novianto, 2015), (Safitri, Edison, 2020), (Natalis, 2020), (Pusadan, 2017), (Yuniarti, 2017), (Solong, Alhabsyi, 2020), (Rosadi, 2021), (Hardisman, 2011), (Mandasari, 2022),

## Gender

Jenis kelamin atau sex, yang merupakan ciptaan Tuhan, sering didefinisikan sebagai gender, pahal hal yang berbeda. Menurut Neufeldt (1984), gender adalah perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan tindakan mereka. Namun, Hilary (1993) menganggap gender sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Haspels dan Suriyasarn (2005) mendefinisikan gender sebagai variabel sosial yang menilai perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal peran, tanggung jawab, dan kebutuhan, serta peluang dan hambatan. Konsep gender tidak hanya berkaitan dengan laki-laki dan perempuan saja, namun telah berkembang mencakup disabilitas, kelompok rentan, dan dikenal dengan istilah *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI)

## Anggaran Responsif Gender

Untuk mengatasi masalah dalam berbagai bidang pembangunan, dana dialokasikan untuk anggaran kesetaraan gender. Menurut Sharp dan Broomhill dalam Budlender et al. (2022), pengeluaran yang berfokus pada gender, pengeluaran yang mendukung kesetaraan gender dalam layanan publik, dan pengeluaran umum atau mainstream termasuk dalam kategori pengeluaran gender responsif. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses, keuntungan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber daya. (Kemenkeu, 2022)

Pengarusutamaan gender (PUG) pada Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia peduli dengan kesetaraan gender dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke berbagai bidang kehidupan dan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Oleh karena itu, Anggaran Responsif Gender (ARG) harus dilakukan.

Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG mengatur ARG di daerah. Namun, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 mengatur ARG dengan melakukan analisis gender baru. Dua indera ukur IPG dan IDG diperlukan untuk mencapai sasaran pengukuran ARG. Metode inovatif diperlukan dalam proses pembagian sumber daya pemerintah daerah yang terbatas. Salah satu metode inovatif ini adalah anggaran gender responsif. Saat ini, bukan hanya pemerintah yang menggunakan metode ini; organisasi swasta dan non-pemerintah juga menggunakannya dalam penganggaran mereka. (Priyashantha, et al., 2021).

Anggaran responsif gender (ARG) berfokus pada penentuan perbedaan dan persamaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, dan bahwa alokasi anggaran seharusnya berbeda jika kebutuhan laki-laki dan perempuan berbeda. Namun, anggaran nasional memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, tetapi anggaran seringkali disusun tanpa mempertimbangkan kesetaraan gender. Pernyataan anggaran dengan kesadaran gender dapat menunjukkan sejauh mana anggaran seimbang secara gender dan digunakan untuk memantau alokasi dan luaran sumber daya. Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) menggambarkan rencana pemerintah untuk melaksanakan ARG ini. Dengan mempercepat perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender, pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih sistematis, terarah, dan sinergis baik di tingkat nasional maupun daerah. Dianggap perlu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ARG dari perencanaan hingga implementasi untuk memastikan bahwa ARG telah dilaksanakan. Pemantauan adalah suatu proses terus-menerus untuk menilai pelaksanaan rencana kegiatan atau kebijakan pembangunan, mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, dan mengantisipasi masalah yang akan muncul segera. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai hasil perubahan dalam Rencana Kerja (Renja) dan ARG yang mendapatkan anggaran, baik yang direncanakan atau tidak. Evaluasi menilai pencapaian tujuan, efisiensi, tingkat keefektifan, dan dampak berkelanjutan dari kegiatan atau program. Evaluasi juga menilai bagaimana kegiatan mengintegrasikan isu gender dalam pelaksanaan dan pelaksanaan.

## Komitmen Pimpinan

Menurut beberapa penelitian (Gainau, 2018), perbedaan gender dalam anggaran publik berdampak pada kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Karena diskriminasi gender merupakan salah satu penyebab anggaran publik yang tidak efisien, pemerintah daerah harus mengatur anggaran mereka berdasarkan gender. Peneliti menyelidiki berbagai penelitian tentang ARG karena dampaknya terhadap suatu negara. Mereka menemukan bahwa penelitian di Nairobi (Afrika) menunjukkan bahwa salah satu hambatan untuk menerapkan ARG adalah pengetahuan stakeholder tentang konsep gender. ARG mengandung dua masalah penting yang berkaitan satu sama lain: kesetaraan gender dan pengelolaan keuangan publik. ARG menegaskan bahwa kesetaraan gender harus dimasukkan ke dalam setiap langkah penganggaran. Penelitian di atas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum memperhatikan penyelenggaraan ARG. Padahal, tujuan utama reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatkan layanan pengiriman dan mengatur alokasi sumber daya yang lebih efisien. Ini menunjukkan nilai-nilai tepat dan efektif dalam pengelolaan keuangan publik. ARG menjadi alat yang memungkinkan gender-based dimensions dimasukkan ke dalam proses penganggaran dan perencanaan. Menurut integrasi ini, menteri keuangan bertanggung jawab untuk mengatur upaya yang menilai dampak sosial terhadap pengelolaan keuangan publik. Untuk mengimplementasikan ARG dengan sukses, Kementerian Keuangan harus bertanggung jawab. Sebaiknya Kementerian Keuangan merangkul ARG sebagai alat untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memperbaiki proses penganggaran pemerintah karena mereka cenderung melihat pencapaian kesetaraan gender di luar jangkauan mereka dan merupakan tugas LSM.

## Kebijakan Peraturan

Anggaran yang diharapkan berbasis gender ditetapkan oleh Millennium Development Goals (MDGs) dan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Untuk memenuhi kebutuhan lokal, kriteria ini dapat diperluas ke dalam program dan kegiatan lokal. Ada empat kriteria utama (Sundari et al., 2008): pembangunan manusia; pengurangan kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan; penyediaan pelayanan publik yang berkualitas tinggi; dan peningkatan daya beli masyarakat. Biduri dkk., 2022

Menurut Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Inpres No. 9 Tahun 2000, strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan acara yang mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan konflik laki-laki dan perempuan selama proses perencanaan, aplikasi, pemantauan, dan penilaian kebijakan dan acara di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan wilayah maupun antarwilayah, diperlukan koordinasi dan pengaturan saat memberikan wewenang yang luas pada wilayah. Menempatkan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab pada wilayah memungkinkan penyelenggaraan swatantra wilayah. Ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 mengenai pemerintahan wilayah. Ruang lingkup undang-undang tersebut mencakup standar perencanaan Pembangunan baik Pemerintah pusat dan provinsi

## Analisis gender

Konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab yang dimiliki laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari keluarga, warga negara, dan budaya masyarakat. Konsep ini juga mencakup harapan, sifat, sikap, dan perilaku yang berkaitan dengan bagaimana laki-laki dan perempuan menjadi. Kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan diberi kesempatan dan kesempatan yang sama dalam pembangunan dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Pembangunan wajib dapat memberikan manfaat yang sama bagi laki-laki dan perempuan jika keduanya terlibat dalam proses pengambilan keputusan. (Biduri et al, 2022)

Analisis gender merupakan proses identifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran dan kesenjangan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki serta implikasinya



pada perbedaan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari hasil pembangunan. Tujuan dilakukannya analisis gender adalah mengidentifikasi aspek kesenjangan gender, mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender, mengidentifikasi langkah-langkah intervensi tindakan yang diperlukan, dan mengetahui perbedaan tingkat kesetaraan (*equity*) dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (*equality*).

Aspek yang dilihat dalam analisis gender sama seperti aspek yang dilihat pada kesenjangan gender yakni akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dalam melakukan analisis gender, data terpilah merupakan kunci utama. Kerangka model analisis gender bermacam-macam diantaranya *Gender Relations Framework* (Moser Framework), SWOT, *Women's Empowerment Framework* (Longwe Framework), *Gender Analysis Matrix* (UNIFEM or Parker), *Nine Box Gender Mainstreaming Measurement Tool*, *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Problem Based Analysis* (PROBA), *Social Impact Analysis*, *Cost Effectiveness dan Cost Benefit Analysis*. *Gender Analysis Pathway* (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender terdiri dari dua aspek utama yakni analisis dan perencanaan *Policy Outlook for Planning* (POP).



Table 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

| No | Author (tahun)         | Hasil Riset terdahulu                                                                                                                                                                  | Persamaan dengan artikel ini                                                               | Perbedaan dengan artikel ini                                |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Biduri et. al (2022)   | komitmen pimpinan, kebijakan peraturan, dukungan politik, penguatan kapasitas teknis dan analisis gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran berbasis gender | komitmen pimpinan kebijakan peraturan analisis gender                                      | penguatan kapasitas teknis                                  |
| 2  | Samodra, Rahayu (2021) | Komitmen pimpinan, Implementasi kebijakan, dan analisis gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran berbasis gender                                           | komitmen pimpinan & analisis gender berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender | Implimentasi Kebijakan, konten kebijakan, konteks kebijakan |
| 3  | Antasari (2016)        | Analisis gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap                                                                                                                            | analisis gender                                                                            | Analisis gender berbasis agama                              |

|    |                           |                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                             |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | kualitas anggaran berbasis gender                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                             |
| .4 | Batubara et al (2020)     | Analisis gender, model komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran berbasis gender                                                             | Model komunikasi politik deliberatif                       | Model komunikasi politik deliberatif                                                                        |
| .5 | Sholeh (2023)             | Analisis gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran berbasis gender                                                                               | Analisis gender, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan | -                                                                                                           |
| 6  | Maimanah, novianto (2015) | Analisis gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran berbasis gender                                                                               | Analisis gender                                            | -                                                                                                           |
| 7  | Safitri, Edison (2020)    | Implementasi struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran berbasis gender                                      | Komitmen pimpinan                                          | Komunikasi, sumber daya                                                                                     |
| 8  | Pusadan (2017)            | Implementasi kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), komunikasi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran berbasis gender | -                                                          | Implementasi kebijakan, komunikasi                                                                          |
| 9  | Yuniarti (2017)           | Kebijakan Peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran berbasis gender                                                                           | -                                                          | Kebijakan instuti adat Bundo Kandung di Nagari dengan menggunakan institusi, kultural, organisasi, personal |
| 10 | Solong, Alhabsyi (2020)   | Partisipasi stakeholder berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran berbasis gender                                                                       | -                                                          | Partisipasi stakeholder                                                                                     |
| 11 | Khaerah, Mutiarin (2016)  | Komitmen pimpinan. Kebijakan, Analisis gender berpengaruh positif dan signifikan                                                                                            | -                                                          | Derajad partisipasi Perempuan, dukungan politik                                                             |

|    |                     |                                                                                                           |                 |   |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
|    |                     | terhadap kualitas<br>anggaran berbasis<br>gender                                                          |                 |   |
| 12 | Mandasari<br>(2022) | Analisis gender<br>berpengaruh positif dan<br>signifikan terhadap<br>kualitas anggaran<br>berbasis gender | Analisis gender | - |

## Method

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (library research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara off line di perpustakaan dan secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## Results and Discussion

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review* ini dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

### Pengaruh komitmen pimpinan terhadap kualitas anggaran berbasis gender

komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender, di mana dimensi atau indikator komitmen pimpinan penguatan komitmen politis dan peningkatan kapasitas teknis berpengaruh terhadap dimensi atau indikator kualitas anggaran berbasis gender (Biduri et al 2022)

Untuk meningkatkan kualitas anggaran berbasis gender dengan memperhatikan komitmen pimpinan, manajemen harus mendorong seluruh pemangku kepentingan di daerah (pemerintah, DPRD, Ormas/LSM), untuk memperkuat komitmen mereka untuk melakukan upaya strategis untuk menerapkan PUG. Untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan ARG, Bappenas, Bappeda, dan Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan harus melanjutkan semua ini. Selain itu, sesuai dengan mandat Permendagri 67 Tahun 2011, Bappeda dan Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan harus memiliki sumber daya yang dinamis dan kuat. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mereka masih kurang efektif karena hanya fokus pada kementerian dan lembaga negara dan belum melibatkan industri (Biduri et al.). Komitmen pemimpin memengaruhi kualitas perencanaan dan anggaran berbasis gender. Persepsi pelanggan dan konsumen tentang komitmen pemimpin dapat meningkatkan perencanaan dan anggaran berbasis gender (Biduri et al, 2022, Safitri, Edsion 2020).

komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Biduri et al, 2022), (Samodra, Rahayu, 2021), dan (Safitri, Edison, 2020).

### Pengaruh kebijakan peraturan terhadap kualitas anggaran berbasis gender

Kebijakan peraturan memengaruhi kualitas anggaran berbasis gender. Pengaruh gender adalah salah satu strategi pembangunan nasional untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, dan pengalaman pria dan wanita ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan, program, dan acara.



Konteks kebijakan (konteks kebijakan) mencakup (1) kepentingan yang mempengaruhi, (2) jenis manfaat, (3) tingkat perubahan yang diinginkan, (4) posisi pembuat kebijakan, (5) pelaksanaan program, dan (6) sumber daya yang tersedia. Konteks kebijakan (context of policy) meliputi (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa serta (3) tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (Samodro, Rahayu (2021)

kebijakan peraturan berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Biduri et al (2022), (Samodro, Rahayu, 2021), (Safitri, Edison, 2020), (Pusadan, 2017) dan (Yuniarti, 2017).

Pengaruh analisis gender terhadap kualitas anggaran berbasis gender

Analisis gender mempengaruhi kualitas anggaran berbasis gender, dimana dimensi atau indikator konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab menjadi laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan diinternalisasi dalam keluarga, warga, dan budaya masyarakat. Kesetaraan gender mengacu pada keadaan di mana laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama dan diberi hak yang sama untuk mencapai potensi dan hak asasi mereka dalam segala aspek kehidupan. Beberapa perwujudan kesetaraan gender dan keadilan gender termasuk: Pertama, laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama dalam proses pembangunan; kedua memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembaharuan. Ketiga orang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk mendominasi sumber daya pembangunan. Keempat, pembangunan wajib dapat memberikan keuntungan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Biduri dkk., 2022

analisis gender berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Biduri et al, 2022), (Samodro, Rahayu, 2021), (Anatasari, 2016), (Sholeh, 2023), (Maimanah, novianto 2015), Khaerah, Mutiarin (2016) dan (Mandasari, 2022).

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di peroleh rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.

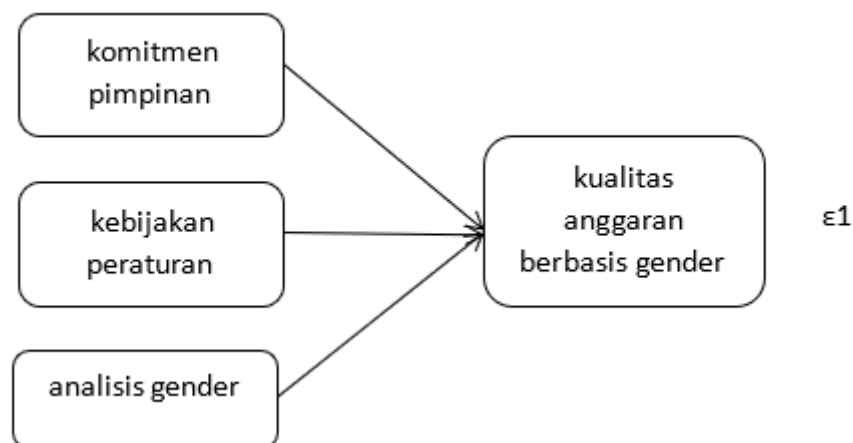


Figure 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, komitmen pimpinan, kebijakan peraturan, dan analisis gender berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi kualitas anggaran berbasis gender, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- Komunikasi (Batubara et al, 2020) dan (Safitri, Edison, 2020)
- Sumber daya (Safitri, Edison 2020)
- Partisipasi stakeholder: (Solong, Alhabsyi 2020)

## Conclusion

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender.
2. kebijakan peraturan berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender.
3. analisis gender berpengaruh terhadap kualitas anggaran berbasis gender.

## Acknowledgement

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kualitas anggaran berbasis gender, selain dari komitmen pimpinan, kebijakan peraturan, dan analisis gender pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas anggaran berbasis gender selain yang variabel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti komunikasi, partisipasi stakeholder, dan sumber daya.

## References

- Aga Natalis, (2020), Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan, Jurnal Pandecta, Volume 15, Nomor 1, Juni, 20220, Hal 64-73, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Ana Sabhana Azmy, Fini Pertiwi, (2020), Implementasi Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) diBidang Pendidikan Kota Bogor, Mwrwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Vol 19 No 2, Hal 160-170, (P-ISSN: 1412-6095, e\_ISSN:2407-1587).
- Beby Masitho Batubara, Rheia K Isabela Barus, Taufik Walhidayat (2020), Model Komunikasi Politik Anggota DPRP Kota Medan dala menghasilkan Kebijakan Responsif Gender, Prosiding The 11th Industrial Reseach Workshop and national Seminar (IRWNS), Agustus, 2020, hal 1220-1227.
- Dian Prima Safitri (2020), Evaluasi Formatif dalam perencanaan dan ppenganggaran responsif gender (PPRG) di Provinsi Kepulauan Riau, Jurnal tata Sejuta Vol 6, No 2, September 2020, Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram, P-ISSN 2442-9023, E-ISSN 2615-0670, <http://ejurnalstiamataram.ac.id>
- Gainau (2018), "Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Daerah," BIP's J. BISNIS Perspekt., vol. 10, no. 2, pp. 126-143, 2018, doi: 10.37477/bip.v10i2.58.
- Galih Putra Samodra, Amy YAyuk Sri Rahayu, (2021), Implementasi Kebijakan Pengarustamaan Gender di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 15, Nomor 3, Desember 2021, Hal 2016-216, ISSN: 2620-5025, E-ISSN: 2621-8410
- Hardisman, (2011), Peranan Pemberdayaan Perempuan dan Analisis Gender pada Penentuan Kebijakan Pengantasan Malnutrisi Anak di Indonesia, kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat nasional, Vol 6 No 1, Agustus 2022, hal 3-8
- Hetifah Sjaifudian (1996), Sensitivitas Gender dalam Perumusan Kebijakan Publik, Jurnal Analisis Sosial, Edisi 4, November 2016, Hal 37-43, Analisis Gender Dalam memahami Persoalan Perempuan, Diterbitkan oleh Yayasan AKATIGA, Pusat Analisis Sosial.
- K. G. Priyashantha, A. C. De Alwis, and I. Welmilla (2021), "Gender stereotypes change outcomes: a systematic literature review," J. Humanit. Appl. Soc. Sci., vol. ahead-of-p, no. ahead-of-print, 2021, doi: 10.1108/jhass-07-2021-0131.
- Makherus Sholeh, (2023), Implementasi Pembelajaran Responsif Gender di Madrasah Ibtidaiyah, Jurnal SAREE (Reseach in Gender Studies), January-June 2023, Vol 5, No 11, pp 37-52, e ISSN: 2746-4466, <https://Journal.iainlhokseumawe.ac.id/indes.php/saree>

- Najamuddin Petta Solong, Ni'ma M Alhabsyi, (2020), Partisipasi Stakeholder dalam penerapan manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Responsif gender di MAN insan Cendekia, Madani : Jurnal Pengabdian Ilmiah, Volume 3 No 2 (Agustus 2020), Hal 10-26, ISSN: 2087-8761, E-ISSN; 2442-8248, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php./md/>
- Nanik Mandasari (2022), Analisis Pengarustamaan Gender dalam Kbijakan Publik Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi), EBISMA (Economics, Busines, manajegent, & Accounting Journal), Vol.2 No 2, September 2022 (50-59)
- Nur Khaerah, Dyah Mutiarin (2016), Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun Anggaran 2014, Jurnal Ilmu pemerintahan dan Kebijakan Publik Vol 3, No 3, Oktober 106, hal 413-445.
- Rina Antasari, (2016), Peran perempuan dalam Perencanaan Keuangan Responsif Gender Berbasis Agama di Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Intizar, Vol 22, No 2, 2016, hal 221-242
- Sarwenda Biduri, Santi Rahma Dewi, Ilmi Usrotin, (2022), Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender di Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Sidoarjo), Proceeding of the ist SENARA 2022, ISSN 2722-0672 (nonline), <https://pssh.umrida.ac.id.>, Published by Universitas Muhamadiyah Sidoarjo.
- Sitti Maimanah, Efri, Novianto (2015), Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di kabupaten Kutai Kartanegara, Jurnal Borneo Adminstrator, Volume 11, No. 2, tahun 2015, hal 201-220
- Sri Yuniarti, (2017), Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender, Kafaah Journal, 7 (2) 2017, (221-234), Print ISSN 2356-0894, Online ISSN 2356-0630, <https://kafaah.org/index.php/kafaa/index>
- Syamsidar Pusadan, (2017), Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Propvinsi Sulawesi Tengah, e jurnal, katalogis, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017, hal 191-201, ISSN: 2302-2019